



Analisis Model Jejaring Kebijakan dalam Pengelolaan Kebijakan Berbasis Kolaborasi antar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Rizky Ilhami

Universitas Padjajaran

rizkyilhmi@unpad.ac.id

Abstract: *Public policy management in the context of modern governance requires effective collaboration between government agencies. One relevant approach to addressing this complexity is the policy network model. This study aims to analyze the policy network model in collaboration-based policy management between government agencies in Central Java Province. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were obtained through documentation studies, policy analysis, and reviews of coordination and collaboration practices between government agencies. The results show that the policy network that has been formed is still partial and not yet systematically integrated. The main problems identified include fragmentation of authority, weak inter-agency coordination, sectoral ego, limited data integration, and low capacity of human resources in managing policy collaboration. This study concludes that strengthening the policy network model through collaborative leadership, institutionalizing inter-agency cooperation, integrating information systems, and increasing the capacity of the apparatus are key to realizing effective, adaptive, and sustainable public policy management.*

Keywords: *policy collaboration, governance, government agencies, Central Java.*

Abstrak: Pengelolaan kebijakan publik dalam konteks tata kelola pemerintahan modern menuntut adanya kolaborasi yang efektif antar instansi pemerintah. Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab kompleksitas tersebut adalah model jejaring kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model jejaring kebijakan dalam pengelolaan kebijakan berbasis kolaborasi antar instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, analisis kebijakan, serta telaah terhadap praktik koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring kebijakan yang terbentuk masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi fragmentasi kewenangan, lemahnya koordinasi lintas instansi, ego sektoral, keterbatasan integrasi data, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam mengelola kolaborasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan model jejaring kebijakan melalui kepemimpinan kolaboratif, institusionalisasi kerja sama lintas instansi, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: kolaborasi kebijakan, tata kelola pemerintahan, instansi pemerintah, Jawa Tengah.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi tata kelola pemerintahan modern menuntut perubahan paradigma dari model birokrasi hierarkis menuju pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Kompleksitas permasalahan publik—seperti pembangunan daerah, pelayanan publik, integrasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi digital—tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu instansi secara sektoral. Oleh karena itu, pendekatan jejaring kebijakan (policy network) menjadi instrumen penting dalam manajemen kebijakan publik untuk mendorong koordinasi, integrasi sumber daya, serta penyelarasan tujuan antar lembaga pemerintah (Rhodes, 1997; Marsh & Stoker, 2019). Pendekatan ini menekankan hubungan saling ketergantungan antar

aktor, pertukaran sumber daya, serta mekanisme koordinasi yang bersifat non-hierarkis dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Dalam konteks tata kelola kolaboratif, jejaring kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi administratif, tetapi juga sebagai ruang interaksi strategis yang memungkinkan terjadinya pembelajaran bersama, inovasi kebijakan, dan peningkatan efektivitas pelayanan publik (Ansell & Gash, 2008; Agbodzakey, 2024). Kolaborasi antar instansi pemerintah menjadi faktor kunci dalam mengatasi fragmentasi kebijakan yang sering muncul akibat ego sektoral, perbedaan kewenangan, serta tumpang tindih program. Melalui jejaring kebijakan yang kuat, integrasi perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan (Klijn & Koppenjan, 2016).

Namun demikian, implementasi jejaring kebijakan dalam praktik pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Perbedaan struktur organisasi, budaya kerja birokrasi, distribusi kewenangan, serta kepentingan kelembagaan seringkali menjadi hambatan dalam membangun kolaborasi yang efektif (Qian, 2021). Selain itu, lemahnya kepemimpinan kolaboratif, rendahnya tingkat kepercayaan antar instansi, serta belum optimalnya mekanisme koordinasi lintas sektor dapat mengakibatkan jejaring kebijakan berjalan secara formalistik tanpa menghasilkan sinergi kebijakan yang nyata (Pfeiffer & Cundari, 2008; Syarien & Samarah, 2023). Kondisi ini berpotensi menimbulkan inefisiensi, duplikasi program, serta rendahnya kualitas implementasi kebijakan publik.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan meningkatnya tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi model tata kelola yang lebih adaptif dan berbasis kolaborasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam jejaring kebijakan dapat memperkuat koordinasi, mempercepat pertukaran data, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis bukti (Dunleavy et al., 2006; Meijer & Bolívar, 2016). Oleh karena itu, penguatan jejaring kebijakan tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga mencakup dimensi kapasitas organisasi, kepemimpinan, serta infrastruktur digital yang mendukung kolaborasi lintas instansi.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan kebijakan berbasis kolaborasi antar instansi menjadi semakin penting seiring dengan kompleksitas pembangunan regional, integrasi program lintas perangkat daerah, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi kebijakan di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran aktor, mekanisme koordinasi, komitmen jangka panjang, serta dukungan kepemimpinan

strategis (Emerson & Nabatchi, 2015; O'Toole, 2015). Tanpa adanya desain jejaring kebijakan yang jelas, kolaborasi antar instansi cenderung bersifat ad hoc dan tidak berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas jejaring kebijakan dalam konteks kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis model jejaring kebijakan dalam kolaborasi antar instansi pemerintah daerah masih relatif terbatas, terutama dalam konteks pengelolaan kebijakan berbasis integrasi program dan koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam fokus analisis pada model jejaring kebijakan intra-pemerintah (inter-agency collaboration) di tingkat provinsi, dengan menekankan pada pola interaksi aktor, mekanisme koordinasi, distribusi peran, serta faktor pendukung dan penghambat kolaborasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model jejaring kebijakan dalam pengelolaan kebijakan berbasis kolaborasi antar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian jejaring kebijakan pada sektor publik, khususnya dalam konteks kolaborasi intra-pemerintah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang mekanisme koordinasi yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik mencakup proses perumusan, implementasi, dan evaluasi yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Dalam konteks pemerintahan modern, kebijakan publik tidak lagi dipahami sebagai produk tunggal dari satu instansi, melainkan sebagai hasil interaksi dan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah. Kompleksitas permasalahan publik mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan kebijakan. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi, koordinasi, dan integrasi kebijakan lintas instansi guna meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

Jejaring Kebijakan (Policy Network)

Jejaring kebijakan (*policy network*) merupakan konsep yang menjelaskan pola hubungan dan interaksi antaraktor dalam proses kebijakan publik. Rhodes mendefinisikan

jejaring kebijakan sebagai hubungan yang relatif stabil antara aktor-aktor yang saling bergantung dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Dalam konteks pemerintahan, jejaring kebijakan menggambarkan hubungan kerja antar instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dan sumber daya berbeda, namun saling membutuhkan. Marsh dan Smith menekankan bahwa jejaring kebijakan tidak hanya mencerminkan struktur hubungan, tetapi juga dinamika kekuasaan, kepentingan, dan institusi yang memengaruhi proses kebijakan. Oleh karena itu, analisis jejaring kebijakan penting untuk memahami bagaimana interaksi antar instansi pemerintah membentuk arah dan hasil kebijakan publik. Karakteristik utama jejaring kebijakan meliputi keterlibatan multi-aktor, hubungan saling ketergantungan, mekanisme koordinasi non-hierarkis, serta interaksi yang berkelanjutan.

Model Jejaring Kebijakan

Model jejaring kebijakan merujuk pada pola atau bentuk hubungan antar aktor dalam jejaring kebijakan. Rhodes mengklasifikasikan jejaring kebijakan ke dalam beberapa model, seperti *policy community* dan *issue network*. *Policy community* ditandai dengan hubungan yang erat, stabil, dan eksklusif antar aktor, sedangkan *issue network* bersifat lebih terbuka, dinamis, dan melibatkan banyak aktor dengan tingkat komitmen yang beragam. Dalam konteks kolaborasi antar instansi pemerintah, model jejaring kebijakan dapat bervariasi tergantung pada tingkat formalitas, intensitas koordinasi, serta distribusi kewenangan. Pemilihan model jejaring kebijakan yang tepat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan kebijakan berbasis kolaborasi.

Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah

Kolaborasi antar instansi pemerintah merupakan bentuk kerja sama horizontal antar lembaga pemerintah dalam rangka mencapai tujuan kebijakan bersama. Menurut Ansell dan Gash, kolaborasi dalam pemerintahan melibatkan proses pengambilan keputusan bersama yang didasarkan pada dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama. Kolaborasi antar instansi menjadi penting untuk mengatasi fragmentasi kebijakan dan ego sektoral yang sering terjadi dalam birokrasi pemerintahan. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup koordinasi administratif, tetapi juga integrasi kebijakan dan program lintas sektor. Keberhasilan kolaborasi antar instansi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kolaboratif, mekanisme koordinasi yang jelas, serta dukungan regulasi yang memadai.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam model jejaring kebijakan dalam pengelolaan kebijakan berbasis kolaborasi antar instansi pemerintah. Pendekatan ini relevan karena model jejaring kebijakan merupakan fenomena sosial dan kelembagaan yang kompleks serta tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan berbasis kolaborasi. Lokasi penelitian di provinsi Jawa Tengah. Waktu penelitian berlangsung selama 4 bulan, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Fokus penelitian ini adalah model jejaring kebijakan dalam pengelolaan kebijakan berbasis kolaborasi antar instansi pemerintah

4. HASIL PENELITIAN

Secara empiris, pengelolaan kebijakan di Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi fragmentasi kewenangan antar perangkat daerah. Setiap instansi memiliki tugas dan fungsi yang spesifik, namun dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih program dan kebijakan lintas sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan antar instansi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga kolaborasi masih bersifat administratif, bukan strategis.

Meskipun koordinasi antar instansi telah difasilitasi melalui forum resmi pemerintahan, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Koordinasi sering bersifat formal dan prosedural, terbatas pada rapat atau surat-menyurat, tanpa tindak lanjut kolaboratif yang berkelanjutan. Hal ini berdampak pada lemahnya sinkronisasi kebijakan antar instansi di tingkat provinsi maupun antara provinsi dan kabupaten/kota.

Permasalahan empiris lain yang menonjol adalah masih kuatnya ego sektoral antar instansi pemerintah. Setiap instansi cenderung berfokus pada pencapaian target internal masing-masing, sehingga kepentingan bersama dalam jejaring kebijakan sering terabaikan. Ego sektoral ini menghambat terbentuknya model jejaring kebijakan yang kolaboratif dan berbasis tujuan bersama.

Pengelolaan jejaring kebijakan antar instansi di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan dalam aspek kepemimpinan kolaboratif. Peran koordinator lintas instansi belum berjalan optimal, baik dari sisi kewenangan maupun kapasitas manajerial. Akibatnya, jejaring kebijakan berjalan tanpa arah strategis yang jelas dan bergantung pada inisiatif instansi tertentu.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, integrasi data menjadi elemen penting kolaborasi. Namun secara empiris, sistem data dan informasi antar instansi pemerintah di Jawa Tengah belum sepenuhnya terintegrasi. Perbedaan platform, standar data, dan

mekanisme berbagi informasi menyebabkan pengambilan keputusan kebijakan tidak berbasis data lintas sektor secara optimal.

Kolaborasi antar instansi pemerintah di Jawa Tengah cenderung bersifat temporer dan berbasis program atau proyek tertentu. Setelah program selesai, jejaring kebijakan sering kali tidak berlanjut secara institusional. Hal ini menunjukkan bahwa model jejaring kebijakan belum dibangun sebagai sistem kolaborasi jangka panjang.

Permasalahan empiris lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam mengelola kolaborasi lintas instansi. Kompetensi dalam manajemen jejaring, komunikasi kolaboratif, dan penyelesaian konflik antar instansi masih perlu ditingkatkan agar jejaring kebijakan dapat berfungsi secara efektif.

Dalam pengelolaan kebijakan berbasis kolaborasi, akuntabilitas sering kali menjadi isu krusial. Di Jawa Tengah, mekanisme akuntabilitas kebijakan kolaboratif belum sepenuhnya jelas, terutama dalam hal pembagian tanggung jawab dan evaluasi kinerja lintas instansi. Hal ini menyulitkan pengukuran keberhasilan jejaring kebijakan secara komprehensif.

Pembahasan

Fragmentasi kewenangan antar instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan masih berjalan dalam pola birokrasi sektoral. Setiap instansi melaksanakan tugas dan fungsi sesuai mandatnya masing-masing, namun belum terintegrasi dalam satu kerangka jejaring kebijakan yang utuh. Kondisi ini menyebabkan kebijakan lintas sektor sulit disinergikan, sehingga tujuan kebijakan bersama sering kali tidak tercapai secara optimal. Dalam perspektif jejaring kebijakan, lemahnya integrasi ini mengindikasikan belum terbentuknya hubungan interdependensi yang kuat antar aktor kebijakan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengembangkan model jejaring kebijakan yang terintegrasi dengan menetapkan kerangka kolaborasi lintas instansi secara formal. Model ini harus menekankan interdependensi antar instansi, pembagian peran yang jelas, serta tujuan kebijakan bersama yang terukur.

Secara empiris, koordinasi antar instansi di Jawa Tengah masih didominasi oleh mekanisme formal seperti rapat koordinasi dan disposisi administratif. Koordinasi semacam ini belum mampu menghasilkan kolaborasi substantif yang berorientasi pada pemecahan masalah bersama. Akibatnya, kebijakan kolaboratif hanya bersifat simbolik dan tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan belum berkembang sebagai arena interaksi strategis antar instansi. Koordinasi formal perlu ditransformasikan menjadi kolaborasi substantif melalui pembentukan tim lintas instansi yang bekerja secara

berkelanjutan. Tim ini tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai unit kerja bersama yang bertanggung jawab terhadap capaian kebijakan kolaboratif.

Ego sektoral menjadi salah satu hambatan struktural dalam pengelolaan kebijakan berbasis kolaborasi. Instansi pemerintah cenderung mempertahankan otoritas dan kepentingan sektoral masing-masing, sehingga enggan berbagi sumber daya maupun kewenangan. Dalam konteks jejaring kebijakan, ego sektoral melemahkan kepercayaan (trust) antar aktor dan menghambat terbentuknya tujuan kolektif dalam pengelolaan kebijakan publik. Untuk mengurangi ego sektoral, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan indikator kinerja kolaboratif ke dalam sistem evaluasi kinerja instansi. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari capaian sektoral, tetapi juga dari kontribusi terhadap tujuan bersama jejaring kebijakan.

Kepemimpinan kolaboratif memegang peran penting dalam mengoordinasikan aktor-aktor dalam jejaring kebijakan. Namun di Jawa Tengah, peran pemimpin jejaring belum berjalan optimal. Ketiadaan aktor koordinator yang memiliki legitimasi dan kewenangan lintas instansi menyebabkan jejaring kebijakan berjalan secara parsial dan bergantung pada inisiatif individu atau instansi tertentu. Hal ini berdampak pada rendahnya konsistensi implementasi kebijakan kolaboratif. Penunjukan aktor koordinator jejaring kebijakan dengan kewenangan lintas instansi menjadi langkah strategis. Pemimpin jejaring harus memiliki legitimasi politik dan administratif, serta kemampuan memfasilitasi kerja sama dan menyelesaikan konflik antar instansi.

Integrasi data dan informasi merupakan prasyarat utama tata kelola pemerintahan modern. Namun, perbedaan sistem dan standar data antar instansi di Jawa Tengah menyebabkan pertukaran informasi tidak berjalan efektif. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan kurang berbasis data lintas sektor, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pengambilan keputusan dalam jejaring kebijakan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membangun sistem integrasi data lintas instansi yang berbasis teknologi informasi. Standarisasi data dan mekanisme berbagi informasi menjadi kunci untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam jejaring kebijakan.

Kolaborasi antar instansi di Jawa Tengah umumnya bersifat sementara dan bergantung pada program tertentu. Ketika program berakhir, jejaring kebijakan cenderung terhenti. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi belum terinstitusionalisasi dalam struktur pemerintahan, sehingga keberlanjutan jejaring kebijakan tidak terjamin. Kolaborasi antar instansi perlu dilembagakan melalui regulasi daerah atau kebijakan internal pemerintah

provinsi. Dengan demikian, jejaring kebijakan tidak lagi bergantung pada proyek atau program sementara, tetapi menjadi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan.

Keterbatasan kapasitas aparatur dalam mengelola jejaring kebijakan menjadi tantangan signifikan. Aparatur pemerintah masih dominan dengan pola kerja hierarkis dan belum sepenuhnya memiliki kompetensi kolaboratif seperti komunikasi lintas sektor, negosiasi, dan manajemen konflik. Hal ini memperlemah efektivitas jejaring kebijakan dalam pengelolaan kebijakan publik. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan manajemen jejaring, kepemimpinan kolaboratif, dan pengambilan keputusan lintas sektor. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat efektivitas jejaring kebijakan dalam jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa model jejaring kebijakan dalam pengelolaan kebijakan berbasis kolaborasi antar instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah belum berjalan secara optimal. Jejaring kebijakan yang terbentuk masih bersifat parsial, formal, dan belum terintegrasi secara sistemik. Fragmentasi kewenangan, lemahnya koordinasi lintas instansi, kuatnya ego sektoral, keterbatasan integrasi data, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kolaborasi kebijakan. Selain itu, kepemimpinan kolaboratif yang seharusnya berperan sebagai penggerak utama jejaring kebijakan belum sepenuhnya mampu memfasilitasi sinergi antar aktor kebijakan. Kolaborasi antar instansi cenderung bersifat sementara dan berbasis program, sehingga belum mampu menjamin keberlanjutan pengelolaan kebijakan publik. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan modern membutuhkan pendekatan jejaring kebijakan yang tidak hanya menekankan koordinasi administratif, tetapi juga kolaborasi strategis yang berorientasi pada tujuan bersama. Dengan demikian, penguatan model jejaring kebijakan menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan kebijakan publik. Jejaring kebijakan yang efektif harus didukung oleh kepemimpinan kolaboratif, mekanisme kelembagaan yang jelas, sistem informasi terintegrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi tata kelola kebijakan berbasis kolaborasi antar instansi pemerintah. Pertama, pemerintah daerah perlu

mengembangkan kerangka kelembagaan jejaring kebijakan yang terintegrasi melalui regulasi atau pedoman operasional yang mengatur peran, tanggung jawab, serta mekanisme kerja sama lintas instansi secara jelas dan berkelanjutan. Kedua, diperlukan penguatan kepemimpinan kolaboratif melalui penunjukan aktor koordinator jejaring kebijakan yang memiliki kewenangan lintas sektor dan kapasitas manajerial yang memadai. Kepemimpinan ini berperan strategis dalam membangun kepercayaan, mengurangi ego sektoral, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan bersama. Ketiga, integrasi sistem data dan informasi lintas instansi perlu menjadi prioritas utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern. Pengembangan platform data bersama akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis bukti dan memperkuat akuntabilitas kebijakan kolaboratif. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan jejaring kebijakan menjadi prasyarat penting. Pelatihan terkait manajemen kolaborasi, komunikasi lintas sektor, dan kepemimpinan adaptif perlu diintegrasikan dalam kebijakan pengembangan aparatur sipil negara. Secara keseluruhan, implikasi kebijakan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan kebijakan berbasis kolaborasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun dan mengelola jejaring kebijakan yang terinstitusionalisasi, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbodzakey, J. (2024). *Introduction to collaborative governance*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57373-6_1
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Ilhami, R. (2023). Strengthening policy networks to create effective public policies. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i3.143>
- Klijin, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance networks in the public sector*. Routledge.
- Marsh, D., & Stoker, G. (2019). *Teori dan metode dalam ilmu politik*. Nusamedia.

- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: A review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408.
- O'Toole, L. J. (2015). Networks and networking: The public administrative agendas. *Public Administration Review*, 75(3), 361–371.
- Pfeiffer, S. I., & Cundari, L. A. (2008). Interagency collaboration: Recurring obstacles and some possible solutions. *Special Services in the Schools*, 15, 109–123. https://doi.org/10.1300/J008V15N01_06
- Qian, J. (2021). Interagency collaboration in China's social policy reform. In *Social policy reform in China* (pp. 81–99). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5025-3_4
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Sukandi, A. (2024). Analysis of opportunities and challenges for Subang city within the framework Rebana triangle economic region. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 68–83.
- Syarien, M. I. A., & Samarah, G. (2023). Interagency coordination drivers, instruments, and success factors: A systematic literature review. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(3), 301–318. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1296>
- Varone, F., Ingold, K., & Jourdain, C. (2019). Studying policy advocacy through social network analysis. *European Political Science*, 18(3), 322–336.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked problems: Implications for public policy and management. *Administration & Society*, 47(6), 711–739.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2016). *Theories of democratic network governance*. Palgrave Macmillan.